



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Analisis Peran Indonesia pada Kebijakan Luar Negeri

Poros Maritim Dunia

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana Program

Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Oleh:

Cahyadi Tampake

2016330217

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Analisis Peran Indonesia pada Kebijakan Luar Negeri

Poros Maritim Dunia

Skripsi

Oleh:

Cahyadi Tampake

2016330217

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional
Program Sarjana



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Cahyadi Tampake
Nomor Pokok : 2016330217
Judul : Analisis Diplomasi Maritim Indonesia melalui Kebijakan Luar Negeri Poros
Maritim Dunia

Menyetujui untuk diajukan pada Ujian

Sidang jenjang Sarjana

Bandung, 23 Juni 2023

Pembimbing,

Mangadan Situmorang, Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Marshall Adi Putra, S. IP., MA.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Cahyadi Tampake
Nomor Pokok : 2016330217
Judul : Analisis Diplomasi Maritim Indonesia melalui Kebijakan Luar Negeri Poros Maritim Dunia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada (Rabu/12 Juli/2023)
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Angguntari Ceria Sari, S.IP., M.Sc.

: 

Sekretaris
Mangadar Situmorang, Ph.D.

: 

Anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahyadi Tampake

NPM : 2016330217

Judul : Analisis Peran Indonesia pada Kebijakan Luar Negeri Poros
Maritim Dunia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik olhe pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 27 Juni 2023



Cahyadi Tampake

ABSTRAK

Nama : Cahyadi Tampake
NPM : 2016330217
Judul Skripsi : Analisis Peran Indonesia pada Kebijakan Luar Negeri
Poros Maritim Dunia

Indonesia telah menjadi negara yang dikenal sebagai negara kepulauan dan berhasil meligitimasi wilayah-wilayah maritimnya sebagai wilayah kedaulatan yang sah berdasarkan hukum internasional melalui Deklarasi Djuanda. Dengan pengakuan ini, Indonesia memiliki peran strategis sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) dan menjadi pusat pengembangan wilayah maritim yang mencakup perdagangan, keamanan, serta konservasi lingkungan laut. Peran ini menjadi kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Upaya untuk meningkatkan posisi Indonesia di Dunia Internasional serta menjadi instrument diplomasi maritim yang dipakai Indonesia di ranah regional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi peran yang dimiliki oleh Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menggunakan teori peran K.J Holsti serta usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan komitmen serta inisiatif dari Poros Maritim Dunia. Temuan dari penelitian ini menjawab bahwa Indonesia telah melakukan berbagai implementasi kebijakan PMD pada rencana pembangunan dan rencana kerja Indonesia yang didalamnya terdapat focus dalam penyelesaian isu-isu kemaritiman. Lebih Lanjut, Indonesia juga mendapat ekspektasi dari dunia internasional sebagai PMD sehingga Indonesia dapat menggunakan PMD sebagai salah satu cara berdiplomasi yang berhubungan dengan hubungan kemaritiman.

Kata kunci: Bebas Aktif, Poros Maritim Dunia, Teori Peran, Kebijakan Luar Negeri

ABSTRACT

Name : Cahyadi Tampake
NPM : 2016330217
Thesis Title : *Indonesia's role Analysis through the World Maritime Axis
Foreign Policy*

Indonesia has become a country known as an archipelagic country and succeeded in legitimizing its maritime territories as a legitimate sovereign territory based on international law through the Djuanda Declaration. With this recognition, Indonesia has a strategic role as the World Maritime Axis (PMD) and is a center for the development of the maritime area which includes trade, security, and the conservation of the marine environment. This role became a policy initiated by President Joko Widodo as an effort to improve Indonesia's position in the international world and became an instrument of maritime diplomacy that was used by Indonesia in the regional and international spheres. This study aims to analyze the conception of Indonesia's role as the World Maritime Axis using K.J Holsti's role theory and the efforts that have been made by Indonesia in carrying out the commitments and initiatives of the World Maritime Axis. The findings of this study answer that Indonesia has carried out various PMD policy implementations in Indonesia's development plans and work plans in which there is a focus on solving maritime issues. Furthermore, Indonesia has also received expectations from the international community as PMD so that Indonesia can use PMD to conduct diplomacy related to maritime relations.

Keywords: Free and Active, World Maritime Axis, Role Theory, Foreign Policy

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Rumusan Masalah	10
1.2.2 Pembatasan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22

Peranan Wilayah Maritim Bagi Kepentingan Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2.1. Perdagangan Maritim Indonesia	23
2.2. Keuntungan Sektor Maritim bagi Indonesia.....	26
2.2.1. Sumber daya maritim Indonesia.....	26
2.2.2. Lapangan Pekerjaan	30
BAB III.....	34
Analisis Peran Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dan Diplomasi Maritim Yang Dijalankan	34
3.1. Usaha-usaha Indonesia Dalam Menjalankan Kebijakan Poros Maritim Dunia	35
3.2. Peran Yang Dijalankan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia	44
3.3. Kebijakan Poros Maritim Dunia Sebagai Instrumen Diplomasi Maritim	51
BAB IV	56
Kesimpulan dan Saran	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan, wilayah kedaulatan Indonesia tidak hanya dihitung melalui luas wilayah darat atau kepulauannya saja, namun juga termasuk di dalamnya wilayah perairan diantara pulau-pulau Indonesia yang diakui sebagai bagian dari negara Indonesia. Wilayah maritim Indonesia memiliki peranan penting bagi kedaulatan serta menopang ekonomi Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya. Wilayah maritim Indonesia juga memiliki peranan penting dalam aktivitas perdagangan Indonesia baik perdagangan secara domestik maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk melindungi kedaulatan maritimnya serta melakukan diplomasi untuk memastikan bahwa wilayah maritim Indonesia dapat diakui serta dihargai oleh negara lain. Diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1957 melalui Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) serta wilayah laut diantara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara Indonesia.¹ Kemudian Indonesia juga berperan aktif didalam perjanjian *United Nations Convention on the Law of the Seas* pada 1982 dengan mengesahkan perjanjian UNCLOS kedalam UU No.17

¹ Kantor Staf Presiden, “Deklarasi Djuanda dan Hari Nusantara,” diakses pada 25 Maret 2022,

<http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/>

tahun 1985.² Dengan sumber daya maritim yang luas dan merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia, hal ini juga didukung oleh peran aktif Indonesia di dunia internasional terkait isu-isu maritim dan perjanjian maritim. Indonesia telah merasakan hasil dari diplomasi maritim di masa lampau dimana melalui Deklarasi Djuanda, wilayah kedaulatan Indonesia semakin diperluas mencakupi wilayah perairannya kemudian melalui UNCLOS, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif serta laut territorial yang memiliki luas lebih dari 5,8 juta km persegi.³

Sumber daya maritim yang dimiliki oleh Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu agenda pembangunan Indonesia, selain sumber daya alam laut juga dapat digunakan sebagai jalur perdagangan dan transportasi yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam maritim, dengan total wilayah laut 5,8 juta km persegi dan garis pantai 81.000 km. Industri ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi utama di masa depan. Selain itu, Indonesia adalah rumah bagi 18 persen dari total terumbu karang dunia dan memiliki lebih dari 620 spesies, terhitung lebih dari 75% dari total semua spesies

² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS," diakses pada 3 April 2022, https://pih.kemlu.go.id/files/UU_NO_17_TH_1985.pdf

³ Indonesia.go.id, "Indonesia Poros Maritim Dunia," diakses pada 3 April 2022, <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>

di dunia.⁴ Sumber daya ini berperan besar bagi industri perikanan Indonesia, PDB sektor perikanan meningkat sebesar 7,35 persen pada tahun 2015 dan 7,89 persen pada tahun 2016, dan meningkat menjadi 5,95 persen pada tahun 2017.⁵ Tekad pemerintah untuk memberantas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, atau kegiatan illegal fishing yang tidak dilaporkan ke instansi yang berwenang atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, telah membantu keberhasilan ini. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, PDB Indonesia dari sektor perikanan sebesar Rp245,48 triliun pada 2014, Rp288,9 triliun pada 2015, Rp317 triliun pada 2016, Rp317 triliun pada 2017, Rp349,53 triliun pada 2018, dan Rp187 triliun. triliun pada kuartal kedua 2018.⁶

Pada pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, 2014. Presiden Joko Widodo pertama kali menegaskan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena menyadari terjadinya pergeseran pusat aktivitas geoekonomi serta geopolitik dunia dari barat ke Asia Timur, karena menurut Joko Widodo sekitar 40% perdagangan dunia terjadi di Kawasan ini. Pada kesempatannya Presiden Joko Widodo menyampaikan lima pilar untuk mewujudkan konsep poros

⁴ USINDO, "Indonesia's Maritime and Coastal Resources," diakses pada 5 April 2022,

<https://usindo.org/events/maritime-resource-management-and-coremap-program-in-indonesia/>

⁵ *Ibid.*

⁶ Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia, "GDP of Indonesia Fisheries Sektor Rises Significantly: Minister of Marine and Fisheries," diakses pada 8 April 2022,

<https://setkab.go.id/en/gdp-of-indonesias-fisheries-sektor-rises-significantly-minister-of-marine-and-fisheries/>

maritim dunia, kelima pilar tersebut adalah: (1) Membangun Kembali budaya maritim, (2) Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan focus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan yang memfokuskan nelayan sebagai pelaku industri utama, (3) Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan pembangunan tol laut, *deep seaport*, industry perkapalan, dan pariwisata maritim, (4) Pengembangan diplomasi maritim dengan bersama-sama menyelesaikan konflik maritim, dan (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim.⁷ Kelima pilar ini kemudian dirangkum kembali menjadi lima pilar kebijakan pelaksanaan kedaulatan maritim yaitu (1) Memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, (2) Menjaga pertahanan dan keamanan, (3) Memastikan keselamatan, (4) Mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab, dan (5) Memproyeksikan kepentingan nasional melalui *leadership* Indonesia di dunia internasional.⁸

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan lima pilar ini, Presiden Joko Widodo memulai agenda pembangunan Tol laut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 24 strategi pelabuhan untuk mewujudkan konsep Tol Laut dalam rangka infrastruktur kelautan. Terdapat 19 pelabuhan feeder dan 5 pelabuhan hub

⁷ Indonesia.go.id, “Indonesia Poros Maritim Dunia,” diakses pada 3 April 2022,

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Lima Pilar Kebijakan Utama Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia ,” diakses pada 5 April 2022,

<https://maritim.go.id/lima-pilar-kebijakan-utama-guna-mewujudkan-indonesia-sebagai/>

nasional dan internasional. Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung merupakan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi hub Tol Laut. Pelabuhan-pelabuhan ini diharapkan menjadi bagian dari jaringan pelabuhan yang lebih besar yang mencakup kawasan industri.⁹ Perluasan 5 pelabuhan hub nasional menjadi hub internasional dan 19 pelabuhan feeder, serta pembangunan 162 pelabuhan perintis berlangsung antara tahun 2014 hingga 2018. Pelabuhan perintis tersebut bertujuan untuk meningkatkan koneksi antar pulau, khususnya di kawasan timur Indonesia.¹⁰

1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu identitas kontemporer Indonesia adalah sebagai negara kepulauan yang pemerintahannya berdaulat atas perairan di antara pulau-pulau yang menjadi wilayah daratan negara tersebut maupun atas pulau-pulau itu sendiri. Namun Indonesia tidak selalu diidentifikasi sebagai negara kepulauan dan berperan sebagainya. Hingga pertengahan tahun 1950-an hampir semua perairan yang terbentang di antara pulau-pulau di Indonesia terbuka untuk kapal-kapal semua negara seperti halnya perairan di tengah samudra luas. Perairan ini bukan milik negara dan tidak ada negara yang mengklaim segala bentuk yurisdiksi atas mereka. Akibatnya, Indonesia terdiri dari ratusan wilayah yang dipisahkan satu sama lain oleh laut lepas. Pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri

⁹ Indonesia.go.id, "Indonesia Poros Maritim Dunia," diakses pada 3 April 2022,

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>

¹⁰ *Ibid.*

Djuanda Kartawidjaja menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki 'kedaulatan mutlak' atas semua perairan yang terletak dalam garis pangkal lurus yang ditarik antara pulau-pulau terluar Indonesia. Garis pangkal ini, yang meliputi semua pulau yang membentuk Indonesia, daratan dan lautannya di mana pemerintah Indonesia menyatakan kedaulatannya menjadi satu wilayah tunggal untuk pertama kalinya. Akhirnya, pada tahun 1982, Indonesia memperoleh pengakuan internasional atas klaimnya ketika Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut secara resmi mengakui keberadaan kategori negara baru yang dikenal sebagai negara kepulauan dan menyatakan bahwa negara-negara tersebut memiliki kedaulatan atas 'perairan kepulauan' mereka.

Setelah pengakuan peran Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah Indonesia di masa-masa Presiden sebelum Presiden Joko Widodo mengimplementasikan beberapa kebijakan maritim yang sesuai dengan peran Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan seutuhnya. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia membentuk Dewan Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 serta Dewan Maritim Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999. Namun, kebijakan ini tidak dikembangkan oleh lanjut karena masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang singkat, hal serupa juga tidak dikembangkan pada masa Kepresidenan Megawati. Baru pada Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mulai mengembangkan kebijakan maritimnya yang disesuaikan dengan visi Presiden SBY yaitu *one thousand friends, zero enemy*.

Kebijakan-kebijakan maritim Indonesia terdahulu berfokus kepada pembangunan maritim demi kepentingan domestic dan seiring waktu masih belum menjadi focus utama Indonesia. Namun, pada masa kepresidenan Joko Widodo, hal ini menjadi fokus pembangunan pemerintah selama dua periode untuk mengembangkan sektor kemaritiman dan membentuk peran baru bagi Indonesia yaitu menjadi Poros Maritim Dunia.

Di masa kepresidenan Joko Widodo, identitas nasional serta agenda pembangunan negara menjadi fokus pemerintah Indonesia. Selama masa pemerintahannya, terdapat berbagai isu yang mengancam kedaulatan maritim Indonesia serta isu yang mengganggu aktivitas perdagangan, tidak hanya isu yang muncul dari luar Indonesia namun Joko Widodo juga harus menyelesaikan isu yang muncul di dalam Indonesia. Terdapat beberapa masalah yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan perwujudan poros maritim dunia, yaitu pembangunan industri perikanan, *illegal fishing*, sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga, serta pembajakan di laut. Walaupun Indonesia memiliki wilayah maritim yang luas dan merupakan salah satu negara dengan konsumsi ikan terbanyak di dunia, namun industri perikanan Indonesia masih memiliki pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan negara dengan industry serupa lainnya. Fakta bahwa komoditas penting seperti ikan dan udang terus menikmati permintaan domestik dan internasional yang tinggi merupakan

pendorong utama pertumbuhan perikanan Indonesia.¹¹ Pada tahun 2014, konsumsi ikan per kapita diprediksi sebesar 33,76 kilogram per tahun. Pada tahun 2014, konsumsi ikan Indonesia sama dengan konsumsi ikan Thailand dan Vietnam, yaitu masing-masing 29,04 kg dan 35,24 kg per tahun. Dari tahun 2011 hingga 2014, volume konsumsi ikan meningkat sebesar 5,35 persen per tahun. Namun, ketika konsumsi domestik per kapita mencapai titik jenuh, tren pertumbuhan melambat menjadi 1,06 persen dari 2015 hingga 2020.¹² Namun walaupun dengan konsumsi ikan yang besar, Industri perikanan Indonesia tidak dapat mencapai target produksi dan ekspor sejak tahun 2015.¹³ Bank Dunia mencatat bahwa perbaikan pengelolaan perikanan Indonesia akan menambah nilai hingga 3,3 miliar USD per tahun dalam waktu 10 tahun. Digabungkan dengan artikel dari Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) yang mengklaim bahwa Indonesia membuang lebih dari 7 miliar USD makanan laut setiap tahun, jelas bahwa Indonesia dapat berbuat lebih banyak untuk memaksimalkan nilai sumber daya lautnya.¹⁴

¹¹ Ipsos, “Indonesia’s Aquaculture Industry: Key Sektors for Future Growth,” diakses pada 11 April 2022, <https://www.ipsos.com/en-id/indonesias-aquaculture-industry-key-sektors-future-growth>

¹² *Ibid.*

¹³ Jason Thomas, “Indonesia's fisheries not managed efficiently,” The ASEAN Post, diakses pada 11 April 2022, <https://theaseanpost.com/article/indonesias-fisheries-not-managed-efficiently>

¹⁴ *Ibid.*

Masalah selanjutnya adalah maraknya *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan India semuanya berbagi batas laut dengan Indonesia. Wilayah laut Indonesia diperkirakan seluas 5.877.879 kilometer persegi, dengan sebagian besar dipenuhi ikan. Dengan wilayah yang luas, sebaliknya, sulit dipantau, apalagi dengan kapal patroli yang hanya sedikit. Setiap tahun, polisi di Indonesia menangkap ratusan kapal penangkap ikan asing di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memperkirakan bahwa penangkapan ikan secara ilegal merugikan negara sebesar Rp 30 triliun per tahun.¹⁵ Masalah *illegal fishing* juga dapat dikaitkan dengan masalah sengketa wilayah maritim dengan beberapa negara tetangga seperti pada isu Laut Cina Selatan di kepulauan Natuna Indonesia.¹⁶

Kebijakan luar negeri Jokowi sejak terpilihnya berfokus kepada pembangunan nasional dengan level yang sangat besar serta mengedepankan kembali prinsip bebas aktif, di dunia internasional saat ini Indonesia aktif menjadi penengah di beberapa isu internasional seperti Rohingya di Myanmar, partisipasi

¹⁵ Reporting ASEAN, "Illegal Fishing Costs Indonesia 3 Billion Dollars A Year," diakses pada 13 April 2022, [https://www.reportingasean.net/illegal-fishing-costs-indonesia-3-billion-dollars-a-year/#:~:text=Across%20Indonesia%2C%20authorities%20catch%20hundreds,about%203.11%20billion%20dollars\)%20annually.](https://www.reportingasean.net/illegal-fishing-costs-indonesia-3-billion-dollars-a-year/#:~:text=Across%20Indonesia%2C%20authorities%20catch%20hundreds,about%203.11%20billion%20dollars)%20annually.)

¹⁶ Sebastian Strangio, "China Demanded Halt to Indonesian Drilling Near Natuna Islands: Report," The Diplomat, diakses pada 13 April 2022, <https://thediplomat.com/2021/12/china-demanded-halt-to-indonesian-drilling-near-natuna-islands-report/>

pada dewan keamanan PBB, dan pada pembentukan identitas Indonesia di dunia internasional. Arah ini bisa dibilang baru jika dibandingkan dengan langkah-langkah yang diambil oleh presiden-presiden sebelum Joko Widodo setelah era reformasi yang lebih berhati-hati dan berfokus kepada masalah domestik. Dengan permasalahan yang dihadapi serta visi agenda pembangunan yang dijalankan oleh Joko Widodo, lantas implementasi apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menerapkan Kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai strategi yang menguntungkan Indonesia dan dapat menyelesaikan masalah maritim yang masih dihadapi oleh Indonesia.

1.2.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya yang telah diaparkan sebelumnya, maka penulis muncul dengan pertanyaan penelitian: **Bagaimana Implementasi Peran yang telah dilakukan Indonesia dalam menjalankan kebijakan Poros Maritim Dunia?**

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi berdasarkan lingkup masalah, waktu, dan fokus untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penulis membatasi penelitian ini pada konsep Poros Maritim Dunia yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dan strategi yang diimplementasi berdasarkan konsep tersebut. Penulis membatasi waktu masalah sejak periode pertama Presiden Joko Widodo dimulai pada tahun 2014 dan awal konsep Poros Maritim Dunia dijelaskan hingga tahun 2022, tahun 2022 dipilih sebagai pembatasan waktu akhir untuk menganalisa perkembangan strategi poros maritim dunia yang telah diimplementasi oleh Presiden Joko Widodo

menjelang akhir masa jabatannya dan telah menjalani setengah dari masa jabatannya yang kedua.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk meneliti serta memahami kebijakan luar negeri Poros Maritim Dunia milik Joko Widodo sebagai agenda pembangunan nasional untuk menguatkan posisi Indonesia di dunia internasional sebagai kekuatan maritim. Dengan melihat hasil yang ingin dicapai dari kebijakan ini serta tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, penelitian ini berusaha untuk memahami penerapan kebijakan ini berkaitan dengan diplomasi maritim Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat digunakan baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi acuan bagi penelitian serupa selanjutnya pada topik yang serupa, dan dalam jangka Panjang, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan actor-aktor pembuat kebijakan lainnya dalam menerapkan kebijakan dan strategi untuk menangani masalah maritim maupun diplomasi maritim Indonesia kedepannya.

1.4 Kajian Literatur

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber acuan dalam memahami lebih lanjut mengenai kebijakan Poros Maritim Dunia. Pada literatur pertama, penulis menggunakan literatur berjudul Indonesia sebagai Poros

Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik yang ditulis oleh Yanyan M. Yani dan Ian Montrama pada Jurnal Pertahanan volume 2 pada tahun 2015. Literatur ini membahas tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan dinamika geopolitik yang sedang terjadi di Indo-Pasifik saat Presiden Jokowi mencetuskan konsep PMD sebagai geopolitik Indonesia untuk kepentingan nasional Indonesia. Gagasan yang serupa sudah pernah disampaikan oleh Alm. Prof. AB Lopian pada tahun 1990-an dan baru mendapatkan momentum tertingginya ketika para kekuatan besar dunia seperti Jepang dan Amerika Serikat mulai mengalihkan perhatiannya ke sektor kelautan di Indo-Pasifik. Ini menunjukkan bahwa persaingan politik Internasional untuk memperebutkan akses dan kendali atas rute pelayaran dan sumber daya alam antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik semakin ketat. Melihat realita ini, Indonesia sebagai negara yang secara geografis berada tepat di tengah Indo-Pasifik juga perlu bersikap demikian agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik.¹⁷

Pada literatur ini, penulis membahas PMD dari 2 (dua) dimensi, yaitu: waktu (masa lampau dan masa kini) dan sudut pandang (*inward looking dan outward looking*). Kerangka pemikiran kajian ini bertujuan untuk menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan persaingan politik internasional di Indo-Pasifik demi kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia sendiri. Teknik pengumpulan data kajian ini adalah melalui data sekunder dari

¹⁷ Yanyan M. Yani dan Ian Montratama, "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik," Jurnal Pertahanan; Bela Negara 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>.

kajian-kajian relevan terkait sejarah bangsa Indonesia sejak jaman Majapahit, politik luar negeri Indonesia, dan struktur keamanan serta dinamika geopolitik di Indo-Pasifik, sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.¹⁸

Konsep geopolitik Poros Maritim Dunia (PMD) dari yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi ini menempatkan laut sebagai dimensi penting geografi dari kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut penulis dari literatur ini, PMD bukan suatu doktrin atau geopolitik tunggal bagi arah pembangunan Indonesia, maka dari itu Pemerintah Indonesia harus memiliki geopolitik dimensi lain seperti dimensi darat dan udara. Penulis dari literatur ini juga merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait PMD seperti pembuatan *roadmap/blueprint* PMD sebagai geopolitik Indonesia dan analisa kebijakan pembangunan karakter nasional yang berwawasan maritim.¹⁹

Selanjutnya, penulis menggunakan literatur yang berjudul Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia yang ditulis oleh M. Najeri Al Syahrin pada *Indonesian Perspective* volume 3 pada tahun 2018. Literatur ini mendeskripsikan pentingnya sinergi antara aspek ekonomi dengan aspek keamanan dalam bingkai kebijakan Poros Maritim dunia. Pembangunan ekonomi dalam kerangka ini diwujudkan lewat 'tol laut' serta upaya konektivitas benda serta jasa ke segala kawasan Indonesia. Dalam perihal isu keamanan, pemberantasan pencurian ikan adalah wujud kebijakan pertahanan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

sekalian upaya buat melindungi kedaulatan teritorial Indonesia.²⁰ Di satu sisi, literatur ini menekankan berartinya pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas pertahanan serta keamanan. Di sisi lain, pembangunan kekuatan pertahanan memerlukan keahlian ekonomi yang kokoh. Ekonomi serta keamanan ialah dua aspek yang tidak terpisahkan serta silih menunjang selaku upaya mewujudkan cita-cita Indonesia selaku negeri maritim dunia.²¹

Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) mewujudkan dua kepentingan strategis bangsa ialah ekonomi serta keamanan. Pembangunan ekonomi memerlukan stabilitas pertahanan serta keamanan, sebaliknya kekuatan pertahanan memerlukan alokasi anggaran serta keahlian ekonomi yang menunjang. Pembagian alokasi anggaran pertahanan sangat dipengaruhi oleh besarnya pemasukan suatu negeri. Sedangkan pemasukan suatu negeri, adalah refleksi dari keahlian negeri tersebut buat melindungi serta menggunakan sumber energi alam yang dia miliki dengan kekuatan pertahanan serta teknologi yang unggul. Sinergitas pembangunan aspek ekonomi serta keamanan yang dicoba dalam kebijakan Poros Maritim dunia telah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kasus keamanan yang butuh buat dicermati, spesialnya kasus ancaman sengketa perbatasan, koordinasi antar lembaga serta kementerian, kasus modernisasi sistem pertahanan serta kenaikan teknologi maritim yang pada kesimpulannya pula menunjang keahlian buat

²⁰ M. Najeri Al Syahrin, "Kebijakan Poros Maritim Jokowi Dan Sinergitas Strategi Ekonomi Dan Keamanan Laut Indonesia," *Indonesian Perspective*, (2018), <https://doi.org/10.14710/ip.v0i0.20175>.

²¹ *Ibid.*

mengamankan perairan teritorial Indonesia.²²

Masa depan industri kemaritiman Indonesia disamping selaku doktrin pertahanan nasional pula selaku ukuran pendukung diplomasi maritim Indonesia secara lebih luas di masa yang hendak tiba. Sinergi antara aspek ekonomi serta keamanan sangat berarti buat dilaksanakan dalam gagasan Poros Maritim sehingga pada kesimpulannya hendak mendukung keahlian Indonesia selaku Poros Maritime global. Apabila sinergi ini sukses dicoba, hingga Jokowi sudah merubah doktrin bawah politik luar negara Indonesia.²³

Terakhir, penulis menggunakan literatur berjudul Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi? yang ditulis oleh Probo Darono Yakti dan Joko Susanto pada Global dan Strategis pada tahun 2011. Literatur ini merupakan riset eksplanatif yang mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep- konsep terpaut dengan pergantian maupun kesinambungan, yang berkenaan dengan strategi maritim RI dalam periode- periode pra PMD. Bersumber pada data- data di lapangan, riset ini menciptakan beberapa kenyataan kalau PMD adalah pergantian dari strategi maritim tadinya. Tidak hanya itu, perbandingan pemikiran terhadap posisi geografis RI bisa dimaksud selaku respons terhadap ancaman yang sudah terdapat yang mana dalam keadaan ini hadapi perpindahan akibat dinamika politik internasional. Riset yang bertabiat kualitatif ini menciptakan kalau PMD dalam sebagian aspek ialah

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

nilai yang diwariskan secara kontinu dari masa pemerintahan tadinya buat secara lebih lanjut dicoba penyesuaian terhadap keadaan kontemporer. Dengan demikian secara universal temuan- temuan tersebut menampilkan kalau PMD adalah pergantian dari strategi kemaritiman tadinya.²⁴

Penulis dari literatur ini mengukur strategi maritim dari pilihan perubahan atau kesinambungan dengan menelaah enam variabel yaitu: (1) Latar Belakang Situasi, (2) Citra Diri Nasional, (3) Peran Negara dalam Strategi Maritim, (4) Trayektori Strategi Maritim, (5) Tonggak Strategi Maritim, dan (6) Prioritas Strategi Maritim. Dari enam variabel yang disebutkan, penulis dari literatur ini kesimpulannya merumuskan kalau pada biasanya terjadi pergantian strategi maritim dari masa pra PMD ke masa PMD mengingat Indonesia mempunyai opsi strategis buat merespons pergantian yang terjalin dalam latar balik suasana yang berbeda. Hingga dari itu, penulis dari literatur ini memandang kalau pergantian strategi maritim yang sudah terjalin bisa disikapi oleh Indonesia dengan membuat sesuatu cetak biru yang bisa berguna buat mengoperasikan strategi maritim PMD dalam kerangka yang lebih instan. Tidak hanya itu butuh terdapat sokongan yang tegas dari pemerintah buat menyadarkan warga hendak khazanah sejarah kebaharian Indonesia yang jadi salah satu prioritas pemerintah dalam pilar awal PMD ialah budaya maritim. Mengingat sepanjang ini upaya yang lagi dicoba pemerintah cuma nampak dalam bentuk raga saja, tanpa mencermati fundamental

²⁴ Probo Darono Yakti dan Joko Susanto, Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?, *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2,

yang wajib terbangun dari pemahaman warga menimpa MDA selaku salah satu perlengkapan buat membumikan lagi strategi maritim.²⁵

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada penulisan ini penulis menggunakan landasaan teori peran untuk memahami pengambilan kebijakan Poros Maritim Dunia, penulis menggunakan teori peran milik K.J Holsti untuk memahami peran Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Teori peran muncul sebagai pendekatan untuk studi kebijakan luar negeri, yang berpendapat bahwa konsepsi pembuat keputusan tentang peran negara mereka di panggung dunia mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri negara itu. Teori peran dapat digunakan untuk memahami bagaimana persepsi pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan Poros Maritim Dunia, serta peran apa yang dijalankan dari status Poros Maritim Dunia kedepannya. Dalam bukunya yang berjudul *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, K.J. Holsti menjelaskan bahwa negara di dunia internasional berperilaku berdasarkan konsepsi peran, status negara, atau berdasarkan tuntunan dari negara lain. Hosti menjelaskan terdapat tiga konsep peran yang sering mengklasifikasi peran sebuah negara yaitu *National Role Conceptions*, *Role Prescription*, dan *Role Performances*.²⁶ Holsti tidak mengimpor banyak bahasa konseptual atau teoretis yang terkait dengan teori

²⁵ *Ibid.*

²⁶ K.J Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," *International Studies Quarterly*
Vol. 14, No. 3 (September, 1970), hal. 233-309

peran. Ia memilih untuk fokus pada gagasan sederhana bahwa Diri (Self), dalam hal ini para pemimpin negara dapat memegang seperangkat keyakinan atau gambaran tentang identitas negara.²⁷

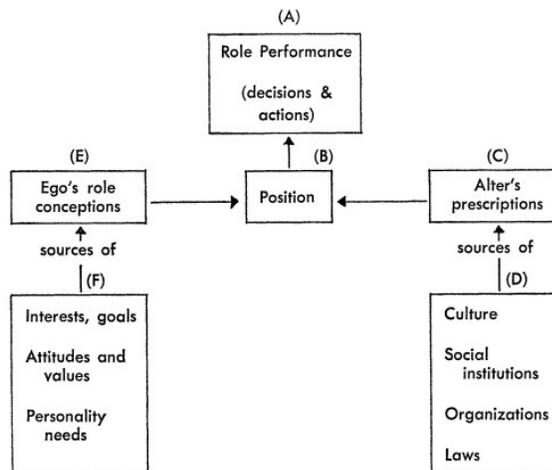


FIGURE 1. Role Theory and the Sources of Human Behavior

INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY

Gambar 1.1 Role Theory and the Sources of Human Behaviour

Sumber: K.J Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, hal. 240.

Kebijakan luar negeri, menurut Holsti, merupakan produk dari konsepsi pembuat kebijakan tentang peran negaranya. Lokasi negara, sumber daya dan bakat sosial ekonomi, nilai-nilai nasional, ideologi, peran tradisional, opini publik, kepribadian, dan kebutuhan politik semuanya mempengaruhi pemikiran pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan, menurut Holsti, memiliki keyakinan akan negara mereka sendiri ketika harus membuat keputusan berdasarkan keyakinan mereka. Holsti juga memahami kemungkinan adanya pergeseran persepsi, karena konsepsi

²⁷ *Ibid.*

tersebut dipengaruhi oleh status pemimpin dan saran atau nilai yang harus dianut negara tersebut, seperti kesepakatan internasional, opini Dunia internasional, pemahaman informal, internasional. prinsip, dan peraturan.²⁸ Dari teori peran ini peneliti dapat melakukan Analisa mengenai Role Performances dari Indonesia terhadap Poros Maritim Dunia dengan melihat Konsepsi peran serta role prescription dari Indonesia.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencakup data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif menurut John W. Creswell melibatkan tiga tingkatan. Tahap pengumpulan data diselesaikan terlebih dahulu, dengan tujuan menyaring informasi. Dokumen, wawancara, dan observasi langsung dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi ini. Tahap analisis data datang berikutnya. Tahap ini berusaha untuk menangkap data secara utuh dan menerapkannya pada berbagai kerangka teori untuk memahami fenomena tertentu. Tahap ketiga dan terakhir memerlukan menyelesaikan interpretasi data.²⁹ Penulis memilih metode kualitatif karena dapat menjelaskan elemen-elemen pendorong dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ John. W Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Third Edition, Sage Publications, (2009), Hal 32.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam tulisan ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui literatur dan media internet. Penulis mengumpulkan data melalui buku, jurnal, artikel serta data kepustakaan lainnya. Penulis juga melakukan pengumpulan data dari *internet* yang berisi artikel berita daring dari media yang kredibel serta berasal dari situ pemerintah yang menjadi informasi tambahan untuk melengkapi data yang telah ada. Teknik pengumpulan data ini dipilih karena sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang dipakai oleh penulis.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab I, penulis memberikan penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Peranan Wilayah Maritim bagi kepentingan Indonesia

Pada Bab II, penulis mamparkan penjelasan peran wilayah maritim Indonesia bagi kepentingan Indonesia, bab ini menjelaskan sumber daya serta perdagangan maritim yang terjadi di wilayah maritim Indonesia, serta keuntungan yang didapatkan Indonesia dari sektor ini.

Bab III: Analisa Peran Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dan Diplomasi Maritim Yang Dijalankan

Pada Bab III, penulis menganalisa kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai peran Indonesia di dunia internasional serta bagaimana kebijakan ini menjadi diplomasi maritim Indonesia di dunia internasional.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Pada Bab IV, penulis menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta memberikan saran atau rekomendasi mengenai topik terkait.